



EFEKTIFITAS *INTERNATIONAL WHALING COMMISSION* (IWC) DALAM PERBURUAN LUMBA-LUMBA ‘TAIJI DRIVE HUNT’ DI TAIJI JEPANG 2013 – 2017

Addien Mirza Pratama

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Dolphin hunting, or commonly called 'Taiji Drive Hunt' which is done massively in Taiji Region, Wakayama Prefecture, Japan occurred every year. Present the role of the IWC as an International Organization that can regulate the hunting of dolphins belonging to the cetacean's category. Based on this background, the formulation of the problem that arises is "how effective is the organization of the International Whaling Commission (IWC) in the case of dolphin hunting in Taiji Japan?". This research aims to examine the effectiveness of the IWC which can also be said as an international regime that focuses on hunting cetaceans especially dolphins in 2013 to 2017. The results of this research are that state behavior is very crucial and culminates in the level of compliance within IWC organization, as well as the ambiguity in the International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW) which causes misinterpretation among IWC members. In dealing the challenges of the effectiveness of IWC in the future, the author has several suggestions regarding cetaceans hunting, so that IWC further enforce the rules which have been previously agreed, so this organization can become better in carrying out their duties and functions. As for suggestions for the Japanese Government, it is expected to use a humane hunting method by not using dangerous tools in carrying out hunting practices for cetaceans, chiefly dolphins.

Keywords: *International Regime, IWC, Taiji Drive Hunt, Cetaceans, Japan.*

Pendahuluan

Keadaan lingkungan saat ini sangat jauh sekali berbeda dari yang sebagaimana mestinya. Perubahan yang terjadi pada lingkungan ini tidak lepas dari adanya fenomena globalisasi. Sekarang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berdampak buruk pada flora dan fauna. Salah satunya yakni aktivitas pembantaian terhadap lumba-lumba atau lebih dikenal dengan *dolphins slaughter*¹ yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena menyebabkan rusaknya ekosistem laut dan termasuk dalam kategori kejahatan transnasional terhadap lingkungan (UNODC, 2010). Aktivitas pembantaian lumba-lumba juga berpengaruh pada ketidakstabilan sistem rantai makanan di wilayah laut. Hanya dibutuhkan waktu 30 menit untuk membunuh lumba-lumba, maka tidak heran jika jumlah lumba-lumba yang dibunuh dapat mencapai 20.000 ekor pertahunnya. Oleh sebab itu, keadaan fauna juga turut menjadi bagian dari isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian.

¹ *Dolphins Slaughter* merupakan pembantaian lumba-lumba yang dilakukan secara massal dengan menusukkan batang logam tipis ke leher lumba-lumba hingga lumba-lumba mati karena kehabisan darah.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kasus perburuan lumba-lumba ‘Taiji Drive Hunt’ yang berlangsung di kawasan Taiji, wilayah Prefektur Wakayama, Jepang. Ironisnya, lumba-lumba diburu dengan cara dibantai dengan sebanyak-banyaknya. Mengingat bahwa lumba-lumba merupakan spesies predator puncak di lautan. Di dalam siklus rantai makanan, lumba-lumba merupakan pemangsa yang andal terhadap hewan kecil lainnya. Jika jumlah lumba-lumba terus berkurang, maka hewan yang seharusnya dimangsa oleh lumba-lumba akan mengalami peningkatan yang sangat tajam. Peningkatan ini akan merusak jaringan makanan di lautan. Keadaan ini akan semakin memburuk bilamana lumba-lumba semakin habis di habitatnya serta dapat membahayakan keseimbangan ekosistem.

Perairan Jepang merupakan habitat hidup bagi lumba-lumba. Penangkapan lumba-lumba di Jepang selama tahun 2000 hingga 2015 mencapai 20.611 ekor, dimana sebanyak 18.970 lumba-lumba dibunuh, dan 1.641 lumba-lumba ditangkap untuk dipindahkan ke penangkaran (Whale and Dolphin Conservation, 2015). Praktik perburuan lumba-lumba di Taiji, Jepang dimulai dari akhir bulan September hingga Maret setiap tahunnya. Dengan target lumba-lumba yang diburu yakni jenis lumba-lumba hidung botol (*bottlenose dolphins*), lumba-lumba *risso's*, dan lumba-lumba bergaris (*striped dolphins*) (The Huffington Post, 2016). Aktivitas *Taiji Drive Hunt*² sudah ada sejak tahun 1960-an. Pemerintah Jepang menganggap bahwa tradisi ini sangat penting. Mereka tidak melarangnya karena tradisi ini telah berumur puluhan tahun sehingga meski ditentang oleh dunia internasional, tradisi ini terus dijalankan hingga sekarang di mana spesies dari lumba-lumba semakin menurun dari waktu ke waktu. Pemerintah Jepang juga menerapkan aturan tentang tata cara penangkapan dan pembantaian dari lumba-lumba. Nelayan tidak diperkenankan untuk membunuh dengan pisau atau sejenisnya. Metode yang diperbolehkan adalah dengan menggunakan menusukkan batang logam tipis ke leher dari lumba-lumba sampai mamalia ini mati karena kehabisan darah (National Geographic, 2016).

Secara internasional, telah muncul berbagai perjanjian terhadap perlindungan *cetacean* di antaranya: *The International Convention for Regulation of Whaling* (ICRW), *the Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals* (CMS), *the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), *the United Nations Convention on Law of the Sea* (UNCLOS), dan *the Convention on Biodiversity* (CBD). Keseluruhan konvensi tersebut merupakan respon terhadap praktik perburuan paus dan *cetacean* lainnya. Lumba-lumba dan paus ditetapkan sebagai hewan dilindungi dan terancam punah oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) (Animal Legal and Historical Center, 2010).

Hadir peran *International Whaling Commission* (IWC) yang mana merupakan badan *Intergovernmental Organization* (IGO) yang dibentuk berdasarkan Konvensi ICRW, memiliki perhatian khusus terhadap perlindungan lumba-lumba (Morton, 2014). Terlebih, dalam website resmi IWC menunjukkan bahwa perhatian IWC hanya pada aspek persoalan paus-paus terdampar. Walaupun dengan jelas disebutkan bahwa perhatian IWC juga diberikan pada lumba-lumba yang terdampar, sebagai berikut; “*many species of whales and dolphins are vulnerable to collisions with vessels*” (IWC, 2014). Akan tetapi, nyatanya dibalik kinerja aktif IWC melindungi paus kecil serta *small cetaceans* seperti lumba-lumba di negara-negara tersebut, menjadikan sebuah keganjilan dikarenakan hingga saat ini *International Whaling Commission* (IWC) masih belum mampu menghentikan dan mencegah perburuan dan pembantaian lumba-lumba di Taiji, Jepang.

² *Taiji Drive Hunt* sebuah fenomena pembantaian lumba-lumba tahunan yang hingga sekarang terus berjalan bertempat di perairan Taiji, Wakayama, Jepang.

Bentuk aksi penyelamatan lumba-lumba yang lainnya yaitu melalui kampanye *Save Japan Dolphins* yang dimulai sejak tahun 2004. Kampanye ini merupakan bentuk sekuritisasi dari *International Marine Mammal Project* (IMMP) yang bertujuan untuk menghentikan perburuan lumba-lumba. Selama ini hadir peran IMMP dalam melakukan sekuritisasi terhadap isu lumba-lumba sebagai salah satu ancaman bagi keamanan non-tradisional di bidang lingkungan. *Taiji Drive Hunt* memiliki banyak sekali dampak baik langsung ataupun tidak langsung. Dampak langsung sudah jelas bawa pembantaian massal ini akan membunuh banyak sekali spesies lumba-lumba yang merupakan jenis mamalia *small cetacean*. Jika hal ini tidak ditanggulangi atau dicegah, spesies lumba-lumba akan mengalami kepunahan perlahan-lahan dan akan merusak ekosistem perairan Jepang. Selanjutnya, dampak tidak langsung akan dirasakan oleh manusia yang mengonsumsi daging lumba-lumba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Jepang, kandungan logam berat pada daging yang dijual sangat tinggi. Jika daging ini terus menerus dikonsumsi, maka risiko terkena kanker juga akan sangat besar (*Journal of Toxicology and Environmental Health*, 2002).

Oleh sebab itu, disini keefektifan *International Whaling Commission* (IWC) dianalisis dengan menggunakan studi kasus *Taiji Drive Hunt* yang berlangsung setiap tahunnya di Taiji, Jepang.

Pembahasan

1. Regulasi Internasional sebagai respon terhadap penurunan populasi lumba-lumba

Jauh sebelum adanya ICRW (*International Convention for Regulation of Whaling*), terdapat doktrin *mare liberum* yaitu dasar atau pondasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang menangkap lumba-lumba untuk melakukan kegiatan penangkapan di laut lepas. *Mare liberum* dicetuskan oleh salah satu filsuf yang cukup terkenal pada era abad ke-15 yakni Hugo Grotius dalam bukunya yang bertajuk *The Free Sea*. Hugo Grotius berpendapat bahwasannya tidak ada yang dapat mengklaim laut adalah milik pihak tertentu, hal tersebut dikarenakan laut merupakan milik setiap manusia (*common heritage of mankind*). Kemudian pendapat Hugo Grotius tersebut menjadi landasan bagi setiap komunitas nelayan di berbagai belahan dunia ketika melakukan penangkapan ikan secara bebas. Namun, makna akan kebebasan ini hanya dapat dibatasi oleh kesepakatan negara-negara yang mana sudah terlibat di dalam sebuah perjanjian (*agreement*) yang bersifat multinasional atau internasional.

Beberapa negara menyadari bahwa jika perburuan lumba-lumba dan paus tetap dilanjutkan maka beberapa spesies akan punah di masa mendatang. Di samping itu, dengan adanya sebuah ide mengenai perburuan paus dan lumba-lumba harus diregulasi, dikarenakan agar stok dapat meningkat secara natural yang mana penangkapan lumba-lumba dan paus harus melalui izin yang dikeluarkan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka pada tanggal 2 Desember tahun 1946 tepatnya di Washington D.C., *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) resmi ditandatangani.

Dalam pertemuan *International Whaling Conference* di Washington D.C pada tahun 1946, sebanyak 19 negara sepakat untuk mengadopsi ICRW yang mana memuat poin-poin seperti adanya limitasi perburuan paus secara komersil yakni hanya diperbolehkan diburu di wilayah tertentu dan dalam jumlah yang terbatas, hal ini mengacu pada *pelagic whaling* (perburuan paus lepas pantai) dengan menggunakan mesin diesel atau uap (Oberthur, 1999). Selain itu, perburuan paus lepas pantai menggunakan pabrik terapung yang mana kebutuhannya tidak bergantung dengan yang ada di daratan, dan paus yang sudah diburu diambil minyaknya untuk diolah serta dijadikan produk lain (Tonnessen, 1982:324). ICRW juga memiliki regulasi terhadap hak masyarakat sipil dalam melaksanakan kegiatan perburuan paus secara konvensional (Oberthur, 1999).

2. Kekuatan Jepang di dalam IWC

Dalam hal ini, kekuatan Jepang muncul ketika Jepang bergabung menjadi anggota dalam IWC (*International Whaling Commission*) pada tahun 1951 yang mana pemerintah Jepang menyatakan kepentingan utamanya yakni melindungi dan menjaga prinsip pendayagunaan yang berkelanjutan (*sustainable use*), yang berlaku pada forum internasional lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan satwa liar (*wildlife*) serta sumber daya hayati di laut (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014). Mengingat bahwa Jepang merupakan negara yang berhubungan langsung terhadap kasus 'Taiji Drive Hunt' yang mana memiliki pengaruh yang sangat besar dari segi domestik. Adapun dampak tidak langsung dalam ranah internasional melalui pemungutan suara (*voting*) serta sumber daya (*resource*) di dalam organisasi IWC.

Selain itu, Jepang mampu mengarahkan *International Whaling Commission* (IWC) dalam meluruskan aktivitas perburuan lumba-lumba di Taiji Jepang lainnya. Sebelum mengkaji lebih dalam mengenai Jepang di dalam IWC, hal utama yang perlu dikaji yakni mengapa Jepang selalu bersikap *pro-whaling* (mendukung aktivitas perburuan lumba-lumba atau paus berukuran kecil). Terdapat dominansi pemerintah di Jepang, yakni Jepang memberikan perlindungan bagi posisi *pro-whaling* mengingat negara Jepang memiliki jabatan pada barisan dewan komisioner di dalam IWC (*International Whaling Commission*, 2014). Adanya kekuasaan *pro-whaling* dalam negara Jepang secara domestik inilah yang akhirnya digambarkan oleh Jepang dalam keanggotaannya di IWC. Sementara itu, di dalam proses pengambilan kebijakan dalam Organisasi Internasional, terdapat kemungkinan bahwa adanya imbas dari pihak-pihak tertentu untuk mengarahkan organisasi kepada pemenuhan kepentingan tertentu.

Dalam kasus ini, penulis melihat bahwa sangat memungkinkan bagi pemerintah domestik Jepang dalam mengarahkan keputusan IWC, yakni melalui proses pengambilan kebijakan IWC (H. Keiko, 2007). Terlebih dengan adanya keuntungan mengenai posisi negara Jepang di dalam IWC, bahwa Jepang termasuk di dalam barisan pimpinan pada posisi dewan komisioner di IWC. Jepang merupakan bagian dari *small group* yang mewakili Komite Ilmiah IWC, yaitu disebut sebagai *Data Availability Group*. Karenanya, hal tersebut memperlihatkan bahwasannya rezim di dalam IWC merupakan *imposed orders* yang mana menggambarkan tipe rezim yang berlangsung dibawah pimpinan sebuah negara dominan. Wajib dipahami bahwa sesungguhnya proses pengambilan keputusan (*decision-making process*) di IWC dilaksanakan setiap pertemuan komisi yang umumnya dilakukan satu kali setiap tahunnya.

3. Jepang sebagai pro-whalers di dalam International Whaling Commission (IWC)

Dalam konteks *taiji drive hunt* ini, terdapat dua partai besar yang berkuasa di pemerintahan Jepang yakni *Liberal Democratic Party* (LDP) serta *Democratic Party of Japan* (DPJ) yang mana telah lama berada di pihak yang mendukung perburuan terhadap paus dan lumba-lumba. Kedua partai besar tersebut mayoritas beranggotakan pemuda, para pejabat serta politisi. Sehari sebelum mereka menyaksikan perburuan lumba-lumba, para anggota partai yang terdiri dari hampir 100 politisi muda serta pejabat berkumpul untuk belajar dan memahami tentang praktik perburuan paus dan lumba-lumba di Jepang (Japan Forward, 2018). Kabinet Jepang saat ini, di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe, telah berulang kali menyuarakan dukungan untuk perburuan lumba-lumba di Taiji yang mana hanya memiliki lebih dari 3.000 penduduk (Japan Forward, 2018). Oleh karenanya, Taiji mendapat aliran dukungan keuangan serta politik yang semakin meningkat, serta perluasannya sendiri. Ditambah dengan penjagaan ketat oleh polisi serta pengiriman penjaga pantai permanen selama musim berburu tiap tahunnya.

Di sisi lain, para pihak yang kontra terhadap perburuan lumba-lumba mengancam partai LDP dengan mengancam partai tersebut sebagai ‘*Liberal Dolphins Party*’ dikarenakan partai tersebut selalu rutin menghadiri rapat tahunan sebelum perburuan lumba-lumba di Taiji, Jepang dimulai. Pemerintah Jepang juga lebih dominan mendukung aktivitas perburuan paus serta lumba-lumba karena telah dianggap sebagai tradisi ribuan tahun dan melindungi mata pencaharian masyarakat (Facts About Japan, 2014).

4. Kepatuhan di dalam organisasi IWC

Prinsip pembentukan Organisasi Internasional utamanya dapat dilihat dari ‘*international agreement*’ yang mengawalnya. Perjanjian internasional ini juga yang menjadi tempat diterapkannya *compliance* bagi Organisasi Internasional. *Compliance* atau kepatuhan merupakan komponen penting di dalam sebuah perjanjian (*agreement*), sebab kepatuhan itu sendiri menjadi manfaat yang berhubungan dengan kepentingan anggotanya (Chayes, 1993). Sementara itu, Antonia Chayes dan Abram (1993) menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang mampu dihubungkan dengan ketidakpatuhan atau penyimpangan di dalam perjanjian internasional yang mendasari terbentuknya sebuah rezim, yaitu ambiguitas atau adanya ketidakjelasan bahasa yang berujung pada munculnya banyak misinterpretasi dan kekeliruan, serta terbatasnya kapasitas yang berbeda-beda diantara anggota dan personal dalam organisasi, sehingga kapabilitas untuk menafsirkannya dalam kebijakan itu terbatas, dan juga adanya aspek temporal yang berhubungan dengan perubahan aspek sosial-ekonomi yang berada pada ranah domestik maupun internasional yang kemudian memberikan dampak bagi organisasi (Chayes, 1993).

Pada awalnya, IWC dibentuk dengan landasan perjanjian yakni *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW). Keanggotaan IWC yang bersifat umum yakni membuka peluang untuk tiap-tiap negara yang ingin bergabung menjadi anggota, tetapi memiliki tugas yang spesifik yaitu hanya sebatas melingkupi isu-isu paus. Selain itu, legitimasi IWC hanya bergantung pada ratifikasi negara anggotanya terhadap perjanjian internasional yang sudah disetujui. Oleh sebab itu, kejelasan mandat atau perintah yang diatur dan termuat di dalam ICRW menjadi sangat penting supaya IWC mampu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Di samping itu, dibutuhkan adanya kesesuaian ideologi terhadap tugas serta tujuan dari IWC diantara negara-negara anggotanya. Tetapi, yang terjadi pada IWC saat ini justru kesimpangsiuran akan hak serta kewajiban negara-negara anggota IWC.

5. Efektifitas *International Whaling Commission* (IWC)

Apapun tujuan akhir daripada pembentukan sebuah rezim internasional, perilaku negara selalu menjadi sasaran langsung akan adanya regulasi. Akan tetapi, penting untuk diperhatikan bahwa perilaku negara yang sering berubah adalah subyektif terhadap hasil yang diinginkan. Rezim internasional seharusnya mampu merubah perilaku negara yang mana merupakan ‘*subobjective*’ agar lebih mengarah pada penurunan aktivitas perburuan lumba-lumba dan paus, yang merupakan ‘*outcome*’ atau hasil tujuan. Negara yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Jepang, yang merupakan pihak yang memiliki wewenang atau otorisasi dalam mengeluarkan izin untuk melakukan penangkapan serta pembantaian lumba-lumba dan paus³. Sementara itu, perihal perlindungan terhadap lumba-lumba, ICRW juga tidak menyampaikan keterangan serta penjelasan yang jelas. Adanya kesepakatan yakni melalui pemungutan suara atau *voting* yang dimenangkan oleh mayoritas yang mana termasuk negara Jepang, dalam rangka membentuk sub-komite yang mengkaji *small cetaceans* (spesies paus berbadan kecil seperti lumba-lumba) yang diselenggarakan pada tahun 1979.

³ International Whaling Commission, “IWC meeting opens with agreement on next steps for IWC Governance Review”, diakses dari <https://iwc.int/iwc-meeting-opens-with-agreement-on-next-steps-for>, pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 10:27 WIB.

Tetapi, hingga saat ini masih ada negara-negara anggota IWC yang merasa bahwasannya perlindungan lumba-lumba bukan merupakan naungan IWC. IWC sendiri bahkan tidak memperlihatkan fokusnya di dalam perlindungan lumba-lumba (*small cetaceans*). Walaupun terjadi risiko kepunahan terhadap banyak populasi *small cetaceans*, Jepang, Kepulauan Faroe, dan Greenland dengan konsisten terus melakukan perburuan dan pembantaian terhadap lumba-lumba pesisir dan jenis lumba-lumba lainnya dalam skala yang amat besar, dan sangat disayangkan mereka melakukan aktivitas perburuan dan pembantaian lumba-lumba menggunakan metode berburu yang tidak manusiawi dan tidak diatur (*unregulated*). Disini penulis dapat menyimpulkan bahwa arahan-arahan mengenai penangkapan *small cetaceans* beserta paus yang termuat di dalam organisasi *International Whaling Commission* (IWC) tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

Efektifitas organisasi *International Whaling Commission* (IWC) dalam kasus perburuan serta pembantaian lumba-lumba di Taiji, Jepang masih jauh api dari panggangnya. Adanya tindakan IWC dalam kasus perburuan serta pembantaian lumba-lumba membuat IWC melenceng dari mandat atau perintah IWC yang sudah terterta di dalam *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) yang mana sebagai *international agreement* yang mendasarinya. Penyesuaian kekuatan di dalam organisasi IWC mampu dikendalikan oleh Jepang dengan menggunakan sumber daya organisasi serta kekuatan domestik negara Jepang. Di samping itu, Jepang juga telah berhasil menciptakan dependensi organisasi IWC terhadap negara Jepang dengan melalui program-program penelitian perikanan Jepang. Adapun teknologi mutakhir yang dimiliki oleh Jepang dalam bidang penelitian ilmiah perikanan begitu mempermudah negara Jepang untuk mengendalikan rasionalitas IWC serta menciptakan kebenaran yang berpihak pada Jepang, seperti program penelitian besar IWC yakni 'SOWER' dan 'POWER' merupakan bagian dari bantuan atau hibah yang diberikan oleh Jepang. Terlebih, sumber daya IWC lebih condong dikuasai oleh Jepang dari sisi ilmiah, sehingga mampu melegalkan dan membenarkan aktivitas perburuan *cetaceans* di Jepang termasuk lumba-lumba.

Mengenai struktur organisasi IWC, bahwa *International Convention for Regulation of Whaling* (ICRW) sebagai *international agreement* yang mendasari berdirinya IWC memiliki banyak ambiguitas. Mulai dari interpretasi kata "whales", izin penangkapan paus tradisional, izin penangkapan paus ilmiah, hingga mengenai desain teknis dalam sistem pengambilan keputusan (*decision-making*) dalam IWC sangat melancarkan terjadinya pelegalan serta pelanggaran di dalam IWC. Dari awal terbentuknya IWC, organisasi tersebut telah banyak mengalami permasalahan di dalam kapasitas atau kinerja organisasinya.

Fakta yang terjadi yakni jumlah *cetaceans* baik yang besar hingga yang kecil (lumba-lumba) justru terus diburu dan dibantai. Terlalu banyak perbedaan pendapat yang berujung pada ketidaksepahaman yang terjadi di dalam anggota-anggota IWC. Khususnya bagi lumba-lumba sebagai anggota mamalia laut (*small cetaceans*), akan sangat sulit sekali mendapatkan perhatian penuh dari IWC melihat adanya kontroversi yang kuat diantara anggota-anggota IWC mengenai *small cetaceans*.

Referensi

- Barnett, J. (2001). *The Meaning of Environmental Security: Ecological Politics and Policy in the New Security Era*. Zed Books (1st ed.). London, New York: Palgrave.
- Blok, A. (2008). *Contesting Global Norms: Politics of Identity in Japanese Pro-Whaling Countermobilization*. *MIT Press Journal*, diakses dari <https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/glep.2008.8.2.39>.

- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1993). *On compliance*. *International Organization*, 47(2), 175–205, diakses dari https://www.jstor.org/stable/2706888?seq=1#page_scan_tab_contents.
- Hirata, K. (2005). *Why Japan Supports Whaling*. *Journal of International Wildlife Law & Policy*, 8(2–3), 129–149, diakses dari <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13880290590965276?scroll=top&needAccess=true&journalCode=uwlp20>.
- Iiff, M. (2008). *Modernisation of the International Convention for the Regulation of Whaling*. *Elsevier*, 32(3), 402–407, diakses dari <https://ideas.repec.org/a/eee/marpol/v32y2008i3p402-407.html>.
- Iwasaki-Goodman, M. (1994). *Chapter 7. Interactional Analysis: IWC where decisions are made. An Analysis of Social and Cultural Change in Ayukawa-Hama (Ayukawa Shore Community)*, diakses dari http://luna.pos.to/whale/iwc_iwa_7.html.
- Krasner, S. D. (1982). *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. In *International Organization* (Vol. 36, pp. 185–205). The MIT Press.
- MAFF. (2018). *Whales and Whaling*. Japan, diakses dari <http://www.maff.go.jp/e/data/publish/index.html>.
- Puchala, D. J., & Hopkins, R. F. (1982). International regimes: lessons from inductive analysis. In *International Organization* (pp. 245–275). Cambridge University Press, <https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/international-regimes-lessons-from-inductive-analysis/BB1CCF4B74C3592A668F10026722FEC4>.
- Rositer, B. (2009). *Cetaceans Society International Attacks Sea Shepherd for Saving Dolphins*, diakses dari <https://www.seashepherd.org.au/news-and-commentary/commentary/cetaceans-society-international-attacks-sea-shepherd-for-saving-dolphins.html>.